

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMK Negeri 1 Gandapura
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester	: X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Tema	: Mari kita Patuhi dan Hormati Lembaga-Lembaga Negara RI
Materi Pokok	: Fungsi dan Kewenangan Lembaga – Lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
Jumlah Pertemuan	: 2 X Pertemuan
Alokasi Waktu	: 4 x 45 menit

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

- 1.4. Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
- 2.4. Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat
- 3.4 Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4.4 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 1.4.1. Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 1.4.2. Membangun nilai-nilai tanggung jawab atas fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.4.1. Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2.4.2. Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3.4.1. Mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia
- 3.4.2. Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945
- 3.4.3. Menganalisis impeachment dalam Ketatanegaraan RI
- 3.4.4. Menganalisis tatakelola pemerintahan yang baik
- 3.4.5. Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI
- 4.4.1. Menyaji hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4.4.2. Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. Tujuan Pembelajaran :

Pertemuan 1

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomuni kasikan peserta didik dapat:

1. Mengidentifikasi suprastruktur dan inprastruktur politik
2. Menyaji hasil telaah identifikasi suprastruktur dan inprastruktur politik di Indonesia
3. Menerapkan perilaku disiplin dan tanggungjawab selama kegiatan pembelajaran berlangsung

Pertemuan 2

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomuni kasikan peserta didik dapat:

1. Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945
2. Menyaji hasil analisis identifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945
3. Menganalisis impeachment dalam Ketatanegaraan RI
4. Menerapkan perilaku disiplin dan tanggungjawab selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

E. Materi Pembelajaran

Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah

- a. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
- c. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
- d. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Pertemuan 1

1. Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik Indonesia.
 - a) Suprastruktur Politik Indonesia
 Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang

fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut.

Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

b) Inprastruktur Politik Indonesia

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Baik kelompok-kelompok tersebut tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan, sebagai berikut.

- 1) Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik dan persamaan keyakinan keagamaan.
- 2) Kelompok Kepentingan (interest group), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.
- 3) Kelompok Penekan (pressure group), yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya, dengan cara melakukan demonstrasi, aksi mogok dan sebagainya.
- 4) Media Komunikasi Politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi

Pertemuan 2

2. Lembaga-lembaga negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945.

Garis besar tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut.

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- a) Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945)
- b) Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota DPD dan berjumlah sebanyak 4 X Jumlah provinsi anggota DPD (UU No. 22 tahun 2003)
- c) MPR adalah lembaga negara bukan lembaga tertinggi negara
- d) Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 (1,2,3) UUD 1945).
- e) MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2) Presiden

- a) Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A(1) UUD 1945).
- b) Syarat menjadi presiden lainnya diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang pasal 6 (2) UUD 1945 Amandemen.
- c) Kekuasaan presiden meliputi menurut UUD 1945 amandemen adalah sebagai berikut.
 - (a) Membuat undang-undang bersama DPR (Pasal 5 (1) dan Pasal 20)
 - (b) Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 (2))
 - (c) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (Pasal 10)
 - (d) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)
 - (e) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
 - (f) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)
 - (g) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 (1))
 - (h) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 (2))
 - (i) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)
 - (j) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Presiden (Pasal 16)
 - (k) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)
 - (l) Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- a) Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 (1) UUD 1945).
- b) Anggota DPR sebanyak 550 orang (UU Nomor 22 tahun 2003).
- c) Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Pasal 20 (1) UUD 1945).
- d) Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A (2) UUD 1945).
- e) Hak anggota DPR hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas (Pasal 20A (3) UUD 1945).

- 4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - a) BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara (Pasal 23E (1) UUD 1945).
 - b) Hasil pemeriksaan BPK di serahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E (2) UUD 1945).

- 5) Mahkamah Agung (MA).
 - a) MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 (2) UUD 1945).
 - b) MA membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 (2) UUD 1945).

 - c) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 (1) UUD 1945).

- 6) Mahkamah Konstitusi
 - a) Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :
 - (a) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD
 - (b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
 - (c) Memutus pembubaran partai politik.
 - (d) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C (1) UUD 1945)
 - (e) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C (2) UUD 1945).
 - b) Mahkamah konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan 3 anggota diajukan presiden.

- 7) Komisi Yudisial (KY).
 - a) KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B (3) UUD 1945).
 - b) KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 (1) UUD 1945).

- 8) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - a) DPD merupakan bagian keanggotan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi.
 - b) DPD merupakan wakil-wakil provinsi.

 - c) Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibukota negara RI (UU No. 22 tahun 2003).
 - d) DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berhubungan dengan daerah.

F. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Saintifik
2. Model Pembelajaran : *Open Ended*

3. Metode : Ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan

G. Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar

- Alat/media : LCD Projector, Gambar
- Bahan Belajar : Video Bhinneka Tunggal Ika
- Sumber Belajar :
 - 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MK, Kelas X*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MK, Kelas X*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 4) Internet / Media masa / Blog : asminkarris.wordpress.com dan asminkarris.blogspot.com
 - 5) Buku PPKn SMK Kelas X lainnya yang relevan

H. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi dan tak kalah penting aspek sikap spiritual peserta didik. 2. Guru menyampaikan topik tentang Kewenangan Lembaga – Lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 3. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan memperkenalkan Model Pembelajaran <i>Open Ended</i> yang akan dilaksanakan. 	15 menit
Kegiatan Inti (Sintak 1)	<p><i>Orientasi peserta didik pada masalah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan sara syukur peserta didik masih dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah Kejuruan (SMK). 2. Guru menegaskan kembali tentang topik dan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. 3. Guru meminta peserta didik untuk mengamati dengan membaca buku Bab 3, Sub-bab A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Sistem Politik Indonesia. 4. Guru meminta peserta didik untuk menganalisis suatu permasalahan terkait dengan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Sistem Politik Indonesia 5. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang penting dan mungkin dapat dieksplorasi pada saat proses menganalisis nanti. 	60 menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
(Sintak 2)	<p><i>Mengorganisasi peserta didik untuk belajar</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok yang beranggotakan antara 4 - 5 orang siswa. Dengan pembagian tugas sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Ganjil (Kelompok 1, 3, 5, dan 7) Analisis tentang Permasalahan dalam Infrastruktur Politik Indonesia. - Kelompok Genap (Kelompok 2, 4, dan 6) Analisis tentang Permasalahan dalam Suprastruktur Politik Indonesia. 2. Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam dalam daftar pertanyaan, terkait dengan tugas yang diberikan. 3. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan. 4. Selama penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi sebanyak- banyaknya tentang tugas diberikan dengan indikator sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Landasan hukum b. Kedudukan dalam ketatanegaraan RI menurut UUD NRI Tahun 1945 c. Identifikasi 1 (satu) permasalahan yang pernah dihadapi lembaga negara tersebut d. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi tersebut 5. Guru bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu, namun peserta didik harus berusaha untuk belajar keras. 	
(Sintak 3)	<p><i>Membimbing penyelidikan individual dan kelompok</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membantu dan membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi tentang tentang tugas diberikan dengan indikator sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Landasan hukum b. Kedudukan dalam ketatanegaraan RI menurut UUD NRI Tahun 1945 c. Identifikasi 1 (satu) permasalahan yang pernah dihadapi lembaga negara tersebut d. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi tersebut 2. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada peserta didik lain dalam kelompok untuk berpikir tentang jawaban terhadap pemecahan masalah terhadap kendala- kendala yang dihadapi lembaga supra dan infrastruktur politik tersebut. 3. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didik dengan memberi konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan. 	

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
(Sintak 4)	<p><i>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membimbing peserta didik dalam kelompok untuk menyusun laporan hasil kajian kelompok. 2. Laporan tersebut dapat berupa bahan tayang (powerpoint) atau laporan tertulis. 3. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiap kelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasil kerja dari kelompok penyaji. 	
(Sintak 5)	<p><i>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan pengumpulan informasi, proses analisis serta proses berlangsungnya tugas kelompok. 2. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang telah mereka lakukan. 	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus tersebut. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar 	15 menit

Pertemuan 2

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi. 2. Guru menyampaikan topik tentang “Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945 dan impeachment dalam Ketatanegaraan RI”. 3. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi. Kelompok yang telah ditentukan topiknya pada pertemuan pertama (kelompok 3 agar mempersiapkan kelompoknya). 	15 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi Kelompok 3, topik Bab 3, Sub-Bab B. Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945 dan Sub Bab C. Impeachment dalam Ketatanegaraan RI. 2. Pada saat Kelompok 3 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materi presentasi (mengamati). 3. Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh Kelompok 3, kelompok lain memberikan saran/masukan dan mengajukan 	60 menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
	<p>pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibahas (menanya).</p> <p>4. Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin pertanyaan (jumlah termin disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia).</p> <p>5. Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan sebelum presentasi kelompok dalam bentuk penugasan mencari informasi terkait dengan materi yang akan di presentasikan.</p> <p>6. Kegiatan mengasosiasikan dilakukan baik oleh kelompok yang mendapat tugas presentasi, juga kelompok lain dengan melakukan analisis dalam kelompok pada saat menyimak jalannya presentasi guna membuat pertanyaan.</p>	
Penutup	<p>1. Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi.</p> <p>2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus tersebut.</p> <p>3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar</p>	15 menit

I. Penilaian Hasil Belajar

- a. Teknik Penilaian
 - Tes tertulis
- b. Bentuk Instrumen
 - Pilihan Ganda .

Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 1 Gandapura

Bireuen, Agustus 2019
Peneliti

Drs. Fadhli.
Nip: 19681215 199403 1 005

Salmiati, S.Pd
Nip: 19770602 200904 2 002

LEMBAR KERJA SISWA

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Gandapura
Mata Pelajaran : PKN
Kelas / Semester : X / I

Nama Kelompok :

Nama/Nis : 1.....

2.....

3.....

4.....

Tugas

Untuk memahami lebih jauh tentang makna sistem pemerintahan Republik Indonesia, silakan kalian lengkapi tabel di bawah ini.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

No	Sistem Pemerintahan Indonesia	
1	Landasan Hukum Impeachment di Indonesia
2	Arti Impeachment
3	Penjabaran Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan RI	1. Legislatif 2. Eksekutif 3. Yudikatif

SOAL TES
(Siklus I)

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Gandapura
Pelajaran : PKN
Kelas/Semester : X / I

• **Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar !**

1. Perhatikan data berikut!

- (1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
(2).Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, (3).Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
(4).Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD, (5).Melantik Presiden dan Wakil Presiden, (6).Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ...
- a. Nomor 1, 2, dan 3
 - b. Nomor 3, 4, dan 5
 - c. Nomor 2, 4, dan 6
 - d. Nomor 3, 4, dan 6
 - e. Nomor 4, 5, dan 6

2. Perhatikan data di bawah ini ! (1).Lembaga Swadaya Masyarakat (2).Dewan Perwakilan Rakyat (3).Dewan Perwakilan Daerah (4).Komisi Pemberantasan Korupsi (5).Presiden dan Wakil Presiden (6).Mahkamah Konstitusi Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah....

- a. 1, 2, 3 dan 4
- b. 1, 3, 4 dan 5
- c. 1, 3, 5 dan 6
- d. 2, 3, 5 dan 6
- e. 3, 4, 5 dan 6

3. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003,

- a. Pasal 1 ayat 6
- b. Pasal 2 ayat 6
- c. Pasal 5 ayat 1
- d. Pasal 6 ayat 1
- e. Pasal 6 ayat 2

4. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah...

- a. Mahkamah Agung
- b. Mahkamah Konstitusi
- c. Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Dewan Perwakilan Daerah
- e. Badan Pengawas Keuangan

5. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah...

- a. Mahkamah Agung
- b. Dewan Perwakilan Rakyat
- c. Dewan Perwakilan Daerah
- d. Dewan Pertimbangan Agung
- e. Badan Pengawas Keuangan

6. Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cenderung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut ... kecuali

- a. Disiplin masyarakat rendah
- b. Kurang tegasnya penegak hukum
- c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
- d. Banyak liputan media masa tentang kejahatan
- e. Kurangnya contoh dan keteladanan dari para pemimpin

7. Peran serta masyarakat dalam sistim politik Indonesia dalam dilakukan dalam berbagai aktivitas, sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah....

- a. Rapat umum
- b. Mimbar bebas
- c. Arak-arakan
- d. Unjuk rasa
- e. Pawai

8. Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam....

- a. Pancasila
- b. UUD NRI tahun 1945
- c. Pembukaan UUD NRI tahun 1945
- d. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945

- e. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945
9. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu.....
- Adanya pemilu berkala
 - Adanya supermasi hukum
 - Adanya akuntabilitas politik
 - Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
 - Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
10. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan keribadian bangsa yang digai dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan.....
- Voting
 - Kerja sama
 - Sikap individual
 - Musyawaharah mufakat
 - Sikap senasib sepenanggungan

KUNCI JAWABAN

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci jawaban
1	E	6	D
2	D	7	C
3	D	8	D
4	B	9	D
5	D	10	D